



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ishartini**

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

Lembar Pengesahan	
Sekretaris Jenderal KKP	
Sekretaris BPPMHKP	



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ishartini**

Jabatan : **Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : **Menteri Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	1	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor (negara)	140
	2	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	99
	3	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)	80
	4	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	500
	5	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (produk)	3.000
	6	Nilai PNBP BPPMHKP (Miliar Rupiah)	55,88
	7	Tenaga kerja yang terlibat di bidang karantina dan pengendalian mutu (orang)	82.500
Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP (indeks)	3,65
	9	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit (%)	100
	10	Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi (%)	90
	11	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan (%)	81
	12	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (%)	95
	13	Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity (unit)	800
	14	Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (<i>Official Control</i>) Lingkup Otoritas Kompeten (unit)	50
	15	Metode dan parameter uji yang dikembangkan oleh laboratorium acuan dan laboratorium penguji (parameter uji)	77
	16	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi (lokasi)	400
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	17	Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup BPPMHKP (unit)	29

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	1	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor (negara)	140
	2	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)	99
	3	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)	80
	4	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	500
	5	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (produk)	3.000
	6	Nilai PNBP BPPMHKP (Miliar Rupiah)	55,88
	7	Tenaga kerja yang terlibat di bidang karantina dan pengendalian mutu (orang)	82.500
Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP (indeks)	3,65
	9	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit (%)	100
	10	Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi (%)	90
	11	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan (%)	81
	12	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (%)	95
	13	Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity (unit)	800
	14	Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (<i>Official Control</i>) Lingkup Otoritas Kompeten (unit)	50
	15	Metode dan parameter uji yang dikembangkan oleh laboratorium acuan dan laboratorium penguji (parameter uji)	77
	16	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi (lokasi)	400
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	17	Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup BPPMHKP (unit)	29

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	18	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP (nilai)	3,3
	19	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (indeks)	86
	20	Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (nilai)	82
	21	Batas tertinggi persentase nilai termuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP (%)	≤0,5
	22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (%)	80
	23	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik BPPMHKP (%)	76
	24	Persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
	25	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (nilai)	93,76
	26	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPMHKP (nilai)	86
	27	Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/strategis lingkup BPPMHKP (%)	80
	28	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP (%)	80
	29	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP (%)	80
	30	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP (%)	100

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	18	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP (nilai)	3,3
	19	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (indeks)	86
	20	Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (nilai)	82
	21	Batas tertinggi persentase nilai termuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP (%)	≤0,5
	22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (%)	80
	23	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik BPPMHKP (%)	76
	24	Persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
	25	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (nilai)	93,76
	26	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPMHKP (nilai)	86
	27	Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/strategis lingkup BPPMHKP (%)	80
	28	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP (%)	80
	29	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP (%)	80
	30	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP (%)	100

Data Anggaran :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	29.055.910.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Karantina Ikan	27.400.000.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	34.200.000.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	438.963.324.000
Total Anggaran BPPMHKP Tahun 2024		529.619.234.000

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan





Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Lembar Pengesahan	
Sekretaris Jenderal KKP	
Sekretaris BPPMHKP	

Data Anggaran :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	29.055.910.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Karantina Ikan	27.400.000.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	34.200.000.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	438.963.324.000
Total Anggaran BPPMHKP Tahun 2024		529.619.234.000

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ishartini